

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu rangkaian proses perubahan menuju keadaan yang lebih baik. Proses pembangunan meliputi berbagai perubahan diberbagai aspek, yaitu sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Pembangunan merupakan syarat penting bagi kemajuan suatu negara. Tujuan dalam pelaksanaan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Todaro,2006). Pembangunan ekonomi yang menjadi tujuan dari suatu negara dapat dimaksimalkan melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga taraf hidup masyarakat meningkat.

Pembangunan ekonomi Indonesia tidak lepas dari kondisi ekonomi global yang sampai saat ini cenderung labil. Hal ini berdampak pada perekonomian domestik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2013 masih tumbuh di kisaran 6 sampai 6,5 persen. Meski demikian, masih terjadi berbagai permasalahan yang dihadapi sekarang. Beberapa permasalahan yang masih terjadi di Indonesia adalah kesenjangan sosial di masyarakat, dan jumlah penduduk miskin yang tidak mengalami penurunan secara signifikan. Tingkat kemiskinan di Indonesia berdasar ukuran kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan kriteria pengeluaran Rp 7000 per hari per orang untuk nasional terdapat orang miskin di Indonesia dengan jumlah 31 juta orang. Data dari Bank dunia dengan ukuran kemiskinan pengeluaran US\$ 2 per hari jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 59 persen atau setengah penduduk Indonesia (*World Bank,2007*).

Sebuah angka kemiskinan yang tergolong tinggi bagi Indonesia dengan potensi sumber daya alamnya yang melimpah dan peran strategis dalam perekonomian dunia. Pembangunan ekonomi yang dilakukan saat ini memiliki tujuan akhir untuk meningkatkan pembangunan manusia melalui setiap program yang dijalankan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Program yang dilakukan pemerintah berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terdapat beberapa indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator keberhasilan suatu daerah dalam upaya untuk meningkatkan kualitas masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tersusun dari tiga komponen, yaitu lamanya hidup yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, tingkat pendidikan yang diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah, serta tingkat kehidupan yang layak yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan (daya beli). Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup yang layak. Semakin dekat nilai IPM suatu wilayah terhadap angka 100, maka keberhasilan pembangunan manusia semakin dekat. Menurut BPS (2004) status indeks pembangunan manusia suatu daerah

diklasifikasikan menjadi empat, yaitu rendah, menengah bawah, menengah atas, dan tinggi.

Munculnya berbagai permasalahan yang terjadi di masing-masing daerah memberikan dampak terhadap hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya dalam hal pengelolaan keuangan. Menyikapi permasalahan tersebut muncul suatu kebijakan yang disebut otonomi daerah. Otonomi daerah bertujuan agar pemerintah daerah lebih inisiatif dan inovatif dalam mengelola kekayaan yang ada di daerah sebagai modal dalam melakukan pembangunan fasilitas publik. Otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia hingga saat ini, merupakan wujud dari diberlakukannya desentralisasi. Otonomi daerah ini sejalan dengan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah sehingga daerah bebas untuk mengatur dirinya tanpa ada campur tangan pemerintah pusat. Setelah pemberlakuan Otonomi daerah, pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia meningkat secara signifikan. Bagian pengeluaran pemerintah daerah pada Tahun Anggaran 2001 meningkat hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya menjadi sekitar 30% dari total pengeluaran pemerintah pusat dan daerah (Brodjonegoro dan Martinez-Vazquez, 2002; Rochana, 2010). Bank Dunia memberikan istilah *The Indonesia's 2001 Big Bang Decentralization* karena hanya dalam waktu singkat Indonesia berubah dari negara yang sangat sentralistik menjadi negara yang sangat desentralistik (Bank Dunia, 2003). Desentralisasi pada bidang keuangan daerah, seluas-luasnya hanya terjadi pada sisi pengeluaran, bukan pada sisi penerimaan daerah. Pentingnya desentralisasi

fiskal pada alokasi belanja daerah merupakan upaya strategis yang dilakukan untuk peningkatan pelayanan publik, sebagai jembatan menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Pemerintah daerah diharapkan mengalokasikan pengeluarannya kepada belanja daerah yang lebih efisien dan efektif untuk kepentingan masyarakat daerah.

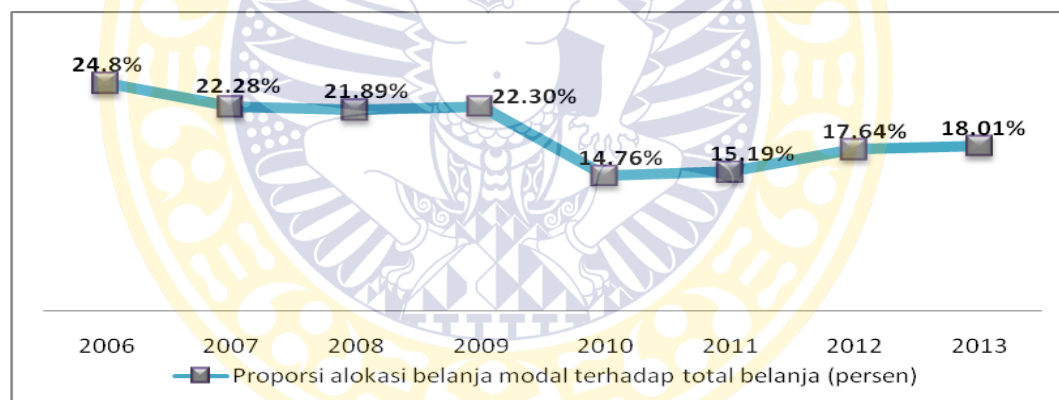
Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, pasal 36 menyebutkan menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja modal merupakan investasi pemerintah yang dapat mendorong kegiatan ekonomi masyarakat dan penyerapan tenaga kerja. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Perkembangan realisasi belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2006-2013 pada Tabel 1.1 menunjukkan peningkatan realisasi belanja modal. Pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 rata-rata realisasi belanja modal mengalami peningkatan tiap tahunnya..

Tabel 1.1
Realisasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Tahun 2006-2013 (Jutaan Rupiah)

Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kabupaten								
1 Pacitan	92,860	105,920	129,101	97,190	72,094	139,396	153,539	132,855
2 Ponorogo	126,434	111,444	178,119	150,961	98,141	127,715	193,382	110,848
3 Trenggalek	77,563	105,773	151,952	114,411	89,495	126,243	134,758	206,760
4 Tulungagung	100,098	124,731	120,087	130,393	126,602	137,953	219,556	153,095
5 Blitar	151,724	185,122	267,402	189,544	174,225	160,389	224,421	330,813
6 Kediri	171,360	175,319	217,955	253,520	147,903	226,072	301,492	292,282
7 Malang	222,575	375,243	331,810	282,790	270,554	291,757	464,305	436,502
8 Lumajang	147,215	155,410	144,194	85,381	75,964	112,578	136,316	163,056
9 Jember	237,704	230,076	274,510	226,759	149,822	210,062	372,744	478,577
10 Banyuwangi	153,438	235,314	161,726	299,668	137,258	250,847	355,482	404,860
11 Bondowoso	72,728	89,000	88,555	112,005	113,214	169,878	210,600	251,145
12 Situbondo	107,529	127,959	134,471	122,878	85,926	120,719	155,801	264,571
13 Probolinggo	127,619	151,258	102,543	164,940	100,021	225,589	260,068	211,260
14 Pasuruan	134,918	107,020	161,925	190,172	128,619	146,452	234,131	247,248
15 Sidoarjo	308,730	268,042	267,985	250,711	174,711	209,377	415,278	518,683
16 Mojokerto	85,244	120,160	204,843	139,741	73,324	157,374	230,227	230,227
17 Jombang	131,124	98,674	143,217	140,543	78,758	68,704	194,719	216,973
18 Nganjuk	140,660	190,931	163,926	207,157	75,500	113,964	184,104	239,383
19 Madiun	91,529	112,934	119,019	138,597	98,513	120,721	188,552	185,515
20 Magetan	148,650	132,632	111,034	139,055	64,212	147,506	131,917	131,066
21 Ngawi	72,690	93,062	155,168	101,671	51,404	155,728	122,174	189,236
22 Bojonegoro	137,057	177,388	277,733	215,208	116,053	118,562	247,573	315,627
23 Tuban	217,797	169,447	268,976	257,723	245,237	210,334	245,496	267,153
24 Lamongan	143,761	147,648	191,931	206,287	106,435	190,276	271,049	240,072
25 Gresik	135,334	92,673	110,117	123,203	84,884	127,093	159,429	417,766
26 Bangkalan	149,203	149,059	187,757	156,259	131,911	289,713	276,400	295,943
27 Sampang	122,348	157,298	202,002	257,822	211,813	184,835	225,078	255,373
28 Pamekasan	110,682	127,754	134,093	139,686	101,444	161,159	199,461	146,092
29 Sumenep	74,087	129,100	164,065	148,315	93,228	132,179	194,361	221,374
Kota								
30 Kediri	92,061	193,731	124,159	197,282	158,431	105,612	189,846	124,499
31 Blitar	79,718	84,470	104,998	111,496	91,736	164,987	90,964	107,175
32 Malang	146,611	149,647	152,465	226,718	195,134	160,159	268,292	353,265
33 Probolinggo	69,002	118,251	102,543	133,313	105,489	107,040	84,707	68,162
34 Pasuruan	51,776	93,512	67,244	114,359	72,568	79,828	69,832	78,112
35 Mojokerto	79,280	45,246	61,518	120,060	88,017	50,302	106,798	67,646
36 Madiun	98,795	44,602	66,687	74,337	123,210	95,675	137,366	180,111
37 Surabaya	395,496	248,491	474,564	1,143,039	1,034,993	543,112	912,716	1,281,395
38 Batu	55,787	79,095	79,735	143,103	97,543	106,341	65,462	155,843

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2013.

Alokasi belanja modal yang mengalami peningkatan dalam nominal ternyata berbanding terbalik dengan proporsi rata-rata total belanja yang dialokasikan untuk belanja modal pada APBD kabupaten/kota. Proporsi alokasi belanja modal terhadap total belanja daerah mengalami penurunan pada tahun 2006 hingga 2008, dengan proporsi sebesar 24,8% di tahun 2006 dan tahun 2008 sebesar 21,89% . Mengalami kenaikan pada tahun 2009 dengan proporsi sebesar 22,3%. Tahun 2010 kembali mengalami penurunan dengan proporsi 14,7% dan mengalami kenaikan di tahun berikutnya. Proporsi rata-rata alokasi belanja modal terhadap total belanja pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2013 dapat dilihat pada Gambar 1.1.



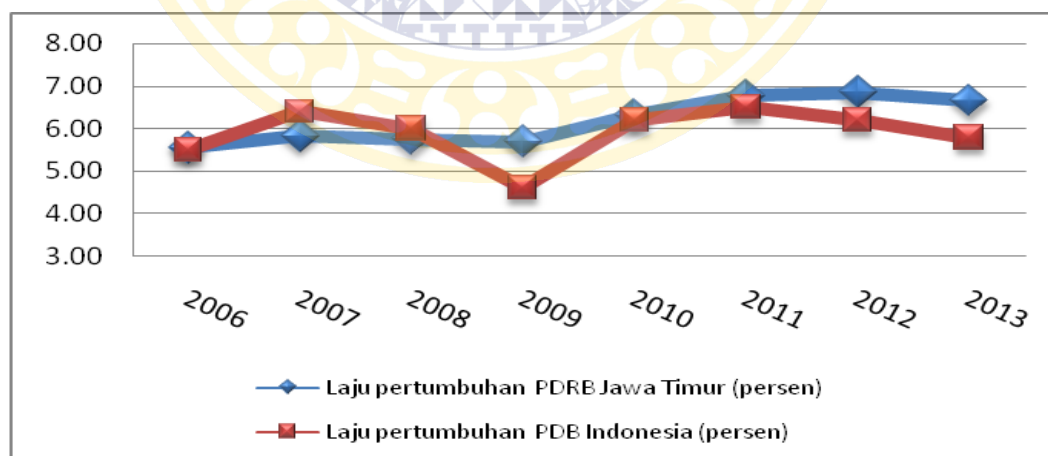
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, diolah.

Gambar 1.1
Proporsi total Belanja Modal terhadap Total Belanja pada APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2013 (dalam persen)

Proses transmisi yang berlangsung dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yakni pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan alokasi belanja modal pada APBD setiap tahunnya. Melalui alokasi belanja modal pada APBD tersebut, pemerintah daerah berusaha secara langsung menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat melalui program dan kegiatan

pembangunan yang diimplementasikan setiap tahunnya. Melalui pembangunan infrastruktur pedesaan dan perkotaan yang bersifat padat karya. Pembangunan infrastruktur ekonomi, akan mendorong aktivitas ekonomi secara luas yang diharapkan dapat mendatangkan investasi swasta, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan terbuka kesempatan kerja, serta pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi menjadi masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat yang disebabkan oleh faktor-faktor produksi yang selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitas pada setiap tahunnya. Perkembangan laju pertumbuhan PDRB Jawa timur dan laju pertumbuhan PDB Indonesia ADHK tahun 2000 selama periode 2006-2013, dapat dilihat pada Gambar 1.2.



Sumber: BPS Provini Jawa Timur, diolah.

Gambar 1.2
Laju pertumbuhan PDRB Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2006-2013 (persen)

Tabel 1.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Tahun 2006-2013 (Persen)

Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kabupaten								
1 Pacitan	4.27	5.16	5.57	6.07	6.53	6.67	6.73	6.02
2 Ponorogo	4.69	6.52	5.63	5.01	5.78	6.21	6.52	5.67
3 Trenggalek	4.79	5.45	5.61	5.64	6.11	6.46	6.62	6.21
4 Tulungagung	5.48	5.75	5.86	6.01	6.48	6.73	6.99	6.63
5 Blitar	5.38	5.78	6.04	5.18	6.08	6.33	6.35	6.18
6 Kediri	4.76	4.65	4.49	4.95	6.04	6.2	6.98	6.52
7 Malang	5.74	6.09	5.75	5.25	6.27	7.17	7.44	6.65
8 Lumajang	5.22	5.5	5.43	5.46	5.92	6.26	6.43	6.51
9 Jember	5.7	5.98	6.04	5.55	6.05	7	7.21	6.9
10 Banyuwang	4.74	5.64	5.8	6.05	6.22	7.16	7.21	6.76
11 Bondowoso	5.58	5.51	5.31	5.01	5.64	6.2	6.45	6.27
12 Situbondo	5.43	5.64	5.11	5.15	5.75	6.31	6.54	6.87
13 Probolinggc	5.69	5.97	5.78	5.72	6.19	6.23	6.55	6.58
14 Pasuruan	5.94	6.17	5.89	5.31	6.14	7.02	7.23	6.97
15 Sidoarjo	5.38	4.99	4.83	4.91	5.63	6.9	7.13	7.04
16 Mojokerto	5.47	5.93	5.88	5.21	6.78	7.03	7.21	6.9
17 Jombang	5.73	6.07	5.79	5.28	6.12	6.83	6.97	6.44
18 Nganjuk	8.04	6.13	5.99	6.03	6.28	6.42	6.68	6.73
19 Madiun	4.6	5.29	5.27	5.08	5.92	6.41	6.43	6.37
20 Magetan	5.12	5.21	5.17	5.36	5.79	6.16	6.39	6.67
21 Ngawi	5.21	5.16	5.52	5.65	6.09	6.14	6.75	6.98
22 Bojonegoro	8.8	10.56	10.24	10.1	11.84	9.19	5.68	5.3
23 Tuban	5.81	6.49	6.72	5.99	6.22	7.13	6.36	7.03
24 Lamongan	5.39	5.76	6.22	6.31	6.89	7.02	7.13	6.9
25 Gresik	6.81	6.7	6.34	9.3	6.89	7.39	7.43	7.14
26 Bangkalan	4.8	5.02	4.92	4.96	5.44	6.12	6.5	6.32
27 Sampang	4.1	4.21	4.58	4.64	5.34	6.04	6.12	5.74
28 Pamekasan	4.52	4.76	5.53	5.19	5.75	6.21	6.32	6.28
29 Sumenep	4.49	4.97	4.3	4.44	5.64	6.24	6.33	6.44
Kota								
30 Kediri	5.19	4.51	4.66	5.06	5.91	7.93	7.51	6.45
31 Blitar	5.89	6.19	6.29	6.21	6.32	6.59	6.78	6.57
32 Malang	6.14	6.2	5.93	6.21	6.25	7.08	7.57	7.3
33 Probolinggc	5.92	6.39	6.02	5.35	6.12	6.58	6.89	6.81
34 Pasuruan	5.65	5.46	5.47	5.03	5.66	6.29	6.46	6.54
35 Mojokerto	5.51	5.98	5.27	5.14	6.09	6.48	7.08	6.86
36 Madiun	5.43	6.15	6.24	6.06	6.93	7.18	7.79	8.07
37 Surabaya	6.35	6.31	6.23	5.53	7.09	7.56	7.62	7.34
38 Batu	6.89	6.8	6.87	6.99	7.52	8.04	8.25	8.2

Sumber: BPS Provini Jawa Timur, 2013.

Pembangunan ekonomi di Jawa Timur mengalami pertumbuhan yang positif melebihi pertumbuhan ekonomi nasional, pada Gambar 1.2 menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional pada periode 2009-2013. Tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5.69 persen, kemudian pada tahun 2010 sebesar 6,31 persen dan pada tahun 2011 sebesar 6.77 persen. Sedangkan tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Jawa timur 6.85 persen, dan tahun 2013 sebesar 6.66 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus menurun. Setelah mencapai pertumbuhan ekonomi 6.5 persen pada 2011, dan 6,23 persen pada 2012, pertumbuhan ekonomi 2013 berada di bawah 6 persen.

Peningkatan pendapatan agregat akan meningkatkan kemampuan pemerintah dan pihak swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana fisik, ekonomi dan sosial. Meningkatnya kualitas layanan publik sebagai dampak dari pembangunan, seperti layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik dengan sendirinya berdampak kesejahteraan masyarakat meningkat. Di sisi lain, meningkatnya kesempatan kerja yang terbuka, akan mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja, sehingga masyarakat yang bekerja mampu meningkatkan pendapatannya. Peningkatan pendapatan masyarakat tersebut berdampak pada peningkatan kemampuan daya beli masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhannya, sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Menurut Mulyadi (2003:57), tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat

memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.

Tabel 1.3
Tenaga Kerja Terserap Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Tahun 2012-2013 (Jiwa)

Kabupaten/Kota	2012	2013	Kabupaten/Kota	2012	2013
Kabupaten			20 Magetan	338,865	336,528
1 Pacitan	334,499	333,778	21 Ngawi	404,810	441,759
2 Ponorogo	478,573	465,871	22 Bojonegoro	627,746	645,659
3 Trenggalek	394,410	390,834	23 Tuban	550,144	581,979
4 Tulungagung	528,123	526,175	24 Lamongan	588,025	602,281
5 Blitar	610,130	593,213	25 Gresik	520,150	584,722
6 Kediri	758,743	742,386	26 Bangkalan	430,926	434,270
7 Malang	1,255,668	1,225,107	27 Sampang	468,415	438,596
8 Lumajang	496,032	498,039	28 Pamekasan	448,177	462,290
9 Jember	1,084,407	1,104,777	29 Sumenep	619,895	604,447
10 Banyuwangi	841,317	825,108	Kota		
11 Bondowoso	387,848	379,827	30 Kediri	127,712	124,735
12 Situbondo	340,878	339,045	31 Blitar	62,628	63,468
13 Probolinggo	611,181	588,067	32 Malang	382,126	398,094
14 Pasuruan	752,597	784,644	33 Probolinggo	103,683	100,142
15 Sidoarjo	924,094	985,246	34 Pasuruan	89,534	91,655
16 Mojokerto	527,486	521,593	35 Mojokerto	60,144	61,402
17 Jombang	561,623	552,110	36 Madiun	78,124	83,366
18 Nganjuk	501,588	515,153	37 Surabaya	1,347,680	1,395,604
19 Madiun	345,753	343,148	38 Batu	98,261	101,339

Sumber: BPS Provini Jawa Timur, 2013.

Kondisi perekonomian Jawa Timur yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, diharapkan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terserap. Karena semakin banyak masyarakat yang terserap dalam dunia kerja, maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kinerja rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur diharapkan memberikan dampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Jawa timur.

Tabel 1.4
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Tahun 2006-2013

Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kabupaten								
1 Pacitan	69.78	70.47	70.91	71.45	72.06	72.47	72.88	73.25
2 Ponorogo	67.13	68.55	69.06	69.75	70.28	71.15	71.90	72.31
3 Trenggalek	71.22	71.67	72.15	72.72	73.23	73.65	74.09	74.45
4 Tulungagung	70.70	71.99	72.45	72.93	73.33	73.75	74.44	74.89
5 Blitar	72.05	72.27	72.73	73.21	73.66	74.05	74.42	74.76
6 Kediri	69.34	70.38	70.85	71.32	71.75	72.28	72.71	73.09
7 Malang	68.39	69.06	69.55	70.09	70.53	71.17	71.94	72.35
8 Lumajang	65.90	66.19	66.64	67.26	67.82	68.54	68.99	69.34
9 Jember	63.04	63.26	63.70	64.33	64.94	65.52	65.99	66.38
10 Banyuwangi	66.80	67.24	67.79	68.35	68.88	69.57	70.53	71.03
11 Bondowoso	60.36	60.75	61.26	62.11	62.93	63.80	64.98	65.61
12 Situbondo	61.79	62.64	63.05	63.68	64.25	64.66	65.06	65.36
13 Probolinggo	60.63	60.97	61.44	62.12	62.99	63.83	64.35	64.79
14 Pasuruan	65.29	65.52	66.01	66.83	67.61	68.23	69.16	69.60
15 Sidoarjo	74.54	74.87	75.34	75.88	76.34	76.89	77.36	77.80
16 Mojokerto	70.61	71.99	72.50	72.93	73.38	73.88	74.41	74.88
17 Jombang	70.29	71.43	71.84	72.33	72.70	73.14	73.85	74.24
18 Nganjuk	68.47	69.24	69.72	70.27	70.76	71.48	71.95	72.36
19 Madiun	67.75	68.23	68.63	69.27	70.18	70.49	70.87	71.12
20 Magetan	70.55	71.20	71.78	72.32	72.72	73.17	73.84	74.22
21 Ngawi	65.96	67.52	68.02	68.41	68.82	69.73	70.20	70.52
22 Bojonegoro	64.93	65.50	65.83	66.37	66.91	67.32	67.74	68.06
23 Tuban	66.46	66.60	67.01	67.68	68.31	68.71	69.17	69.56
24 Lamongan	67.41	67.88	68.33	69.02	69.63	70.51	71.04	71.42
25 Gresik	72.51	73.00	73.49	73.97	74.46	75.17	75.97	76.56
26 Bangkalan	62.72	62.97	63.39	64.00	64.50	65.01	65.68	66.12
27 Sampang	56.27	56.99	57.66	58.67	59.69	60.77	61.66	62.46
28 Pamekasan	61.98	62.48	63.12	63.81	64.60	65.47	66.51	67.11
29 Sumenep	63.08	63.70	64.24	64.81	65.59	66.00	66.41	66.79
Kota								
30 Kediri	73.59	74.45	75.10	75.68	76.28	76.78	77.19	77.59
31 Blitar	75.58	75.87	76.59	76.98	77.41	77.89	78.30	78.63
32 Malang	75.34	75.71	76.19	76.69	77.19	77.75	78.42	78.80
33 Probolinggo	71.51	72.76	73.28	73.72	74.33	74.85	75.43	75.81
34 Pasuruan	71.98	72.20	72.59	73.01	73.45	73.89	74.32	74.64
35 Mojokerto	75.15	75.65	76.11	76.43	77.02	77.49	78.00	78.40
36 Madiun	74.35	75.41	75.89	76.22	76.60	77.06	77.49	77.82
37 Surabaya	75.11	75.86	76.36	76.81	77.27	77.85	78.32	78.71
38 Batu	71.45	72.83	73.32	73.88	74.45	74.92	75.41	75.75

Sumber: BPS Provini Jawa Timur, 2013.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan IPM dapat dilakukan melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Menciptakan pertumbuhan ekonomi membutuhkan adanya penanaman modal atau investasi. Investasi merupakan kebutuhan dalam pembangunan yang menghendaki adanya pertumbuhan dan pembangunan manusia. Peningkatan investasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB. Pemerintah daerah perlu membuat kebijakan yang mendukung penanaman modal yang saling menguntungkan baik bagi pemerintah daerah, pihak swasta maupun terhadap masyarakat daerah. Adanya bantuan dari pihak swasta diharapkan proses pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan baik, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Status Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di provinsi Jawa Timur selama tahun 2006-2013 dapat diklasifikasikan ke dalam klasifikasi menengah ke atas. Tabel 4.1 menunjukkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2013.

IPM ini juga mempengaruhi kelangsungan pembagunan berikutnya, karena sumberdaya manusia merupakan sentral keberlangsungan pembangunan. Perekonomian yang berkembang dengan pesat bukan jaminan yang paling baik bahwa Negara atau daerah itu makmur. Suatu Negara atau daerah dapat dikatakan makmur adalah ketika pertumbuhan ekonomi yang tinggi kemudian diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat melalui indeks pembangunan manusia. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, untuk itu

dilakukan suatu penelitian dengan judul “Pengaruh Belanja Modal pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan tenaga Kerja, serta Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disusun rumusan masalah yang akan diteliti, yakni sebagai berikut :

1. Apakah belanja modal pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah belanja modal pemerintah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja secara parsial dan bersama-sama berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disusun tujuan utama dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Menguji dan menganalisis pengaruh belanja modal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur
2. Menguji dan menganalisis pengaruh belanja modal pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

3. Menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja secara parsial dan bersama-sama terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan mengenai pengaruh belanja modal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
2. Bagi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan dalam pengelolaan belanja modal pemerintah yang potensial dan upaya penyerapan tenaga kerja serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan menjadikan sebagai referensi bagi penelitian lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

1.5. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bagian yang saling berkaitan yaitu sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang diteliti. Dalam bab ini juga akan menguraikan tentang pengkajian hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya serta berisi tentang model analisis, hipotesis, dan kerangka berfikir.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan tentang pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data serta teknik analisis.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang deskripsi penelitian, analisis data, pembuktian hipotesis dan pembahasan mengenai hasil analisis. Uraian objek penelitian dan analisis penelitian didasarkan pada data yang diperoleh, baik data sekunder maupun data yang telah diolah oleh penulis.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan berisi tentang kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya serta saran yang diajukan sebagai alternatif pemecahan masalah sehingga diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.